

Politik Islam antara Dakwah dan Orientasi Kekuasaan

Zainal Fikri

Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari

This paper discusses the Islamic politics between the orientation of dakwah and power. Although dakwah was originally synonymous with cultural efforts, but the efforts of those who pull dakwah into the circle of jihad and politics have changed the meaning of the dakwah. In political Islam, dakwah is identical with political purposes of Islam itself, namely the establishment of Sharia and Islamic State. However, the other parties politicize Islam to gain power. According to some people, political parties, including the Islamic party, in Indonesia, politicize Islam rather than fight for Islam.

Keywords: political, structural, cultural, dakwah, jihad.

Tulian ini membahas tarik menarik politik Islam antara orientasi dakwah dan kekuasaan semata. Walaupun dakwah pada awalnya identik dengan upaya kultural, namun upaya pihak-pihak yang menarik dakwah ke dalam lingkaran jihad maupun politik telah merubah pemaknaan terhadap dakwah. Dalam Islam politik, dakwah identik dengan tujuan politik Islam itu sendiri, yaitu tegaknya syariat dan negara Islam. Tapi, pihak lainnya mempolitisasi Islam untuk meraih kekuasaan. Menurut sebagian kalangan, partai politik, termasuk partai Islam, di Indonesia lebih banyak melakukan politisasi Islam daripada memperjuangkan Islam.

Kata kunci: politik, struktural, kultural, dakwah, jihad.

Dari perspektik unsur-unsur dakwah, hubungan dakwah rahmatan lila'alamin, politik, jihad dan kekerasan dapat dilihat pada aspek metode, objek dakwah (*mad'u*) dan tujuan dakwah. Untuk memahami unsur-unsur dakwah ini dan hubungannya, filsafat berperan sebagai studi analitis untuk mengklarifikasi unsur-unsur dakwah, dan hubungannya dengan konsep-konsep terkait.

Dakwah Damai dan Kekerasan

Poston (1991) mengklasifikasi filsafat dakwah (*missionary philosophies*) kaum Muslim di Amerika dan Kanada, misalnya, ke dalam dua pendekatan: dakwah damai-defensif (*defensive-pacifist*) dan dakwah aktivis-

ofensif (*offensive-activist*). Yang pertama adalah kaum Muslim yang menjaga dan mempertahankan keislaman mereka, namun mereka tidak mengajak non-Muslim di sekitar mereka masuk Islam. Yang kedua adalah kaum Muslim yang berusaha merubah orang-orang non-Muslim, baik pada tingkat perorangan maupun masyarakat, menjadi penganut Islam. Pembagian seperti ini muncul karena perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai hubungan tujuan dakwah dan jihad, serta paksaan dalam beragama.

Bagi mereka yang meyakini hakikat dakwah adalah penyebaran Islam secara damai, dakwah tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan walaupun tindakan kekerasan itu

Email penulis: zainalpikri@iain-antasari.ac.id

disebut “jihad” atau dilakukan untuk tujuan kebaikan. Mereka tidak memungkiri ada aspek kekerasan dalam Islam, tapi mereka tidak memandangnya sebagai bagian dari dakwah. Bagi mereka, jihad, selama sebagai usaha damai, dapat menjadi bagian dari ruang lingkup dakwah, sebaliknya tidak, karena dalam dakwah tidak boleh ada paksaan. Jihad dalam artian perang atau agresi militer tidak bisa menghindari kekerasan, oleh karena itu bukan bagian dari dakwah (Egdunas Raciuis 2004, 65).

Berbeda dengan kelompok di atas, ada yang berpendapat bahwa dakwah dan jihad adalah satu kesatuan. Bagi Hasan al-Banna (1990: 18), misalnya, seorang da'i adalah juga seorang mujahid.

Perbedaan pendapat tentang hubungan dakwah dan kekerasan muncul dari perbedaan interpretasi terhadap Al-Quran tentang “Tidak ada paksaan dalam agama.”

Mengenai dakwah dan kekerasan, para aktivis dakwah terbagi menjadi dua kategori—aktivis dakwah damai (*pacifists*) (yaitu mereka yang menolak kekerasan dalam dakwah) dan aktivis dakwah *offensive* (yakni mereka yang membolehkan penggunaan kekerasan dalam dakwah) (Raciuis 2004, 186-187).

Aktivis dakwah *offensive* memandang dakwah sebagai bagian intrinsik dari politik. Tujuan dakwah adalah tujuan politik, dakwah bertujuan untuk mencapai tujuan politik, yaitu meraih kekuasaan untuk mendirikan negara Islam.

Wacana tentang Islam radikal melihat hubungan doktrin dakwah, jihad, dan kekerasan. Para penulis tentang terorisme di dunia Islam menelusuri aksi kekerasan fisik terhadap orang yang “berbeda” kepada pemikiran tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah, Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Al-Maqdisi, Al-Zawahiri.

Shaul Shay (2008) menganalisis akar gerakan-gerakan jihad global pada kesamaan visi mereka tentang konsep “Umat” (pembentukan komunitas Muslim yang bersatu di seluruh dunia). Untuk mewujudkan visi ini, instrumen untuk mewujudkan visi ini adalah Jihad (Perang Suci) dan Dakwah; kedua istilah ini diambil dari konsep dunia Islam klasik dan mencerminkan masa-masa kejayaan Islam. Dari sudut pandang Islam, dunia dibagi menjadi dua bagian: Pertama, Dar al-Islam, yaitu wilayah yang dikontrol oleh Islam, dan kedua—Dar al-Harb, yaitu wilayah yang dikontrol orang-orang kafir. Kedua instrumen ini—Dakwah dan Jihad—saling mendukung dan melengkapi. Dakwah berdasarkan cara-cara non-kekerasan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam melalui sistem pendidikan, ceramah-ceramah, dan bantuan sosial, sedangkan Jihad mencapai tujuannya melalui jalan kekerasan.

Ikhwanul Muslimin (IM) dan alumni Afghanistan berbeda pendapat tentang dakwah dan jihad. Bagi IM, tujuan utama mereka adalah *enlistingsouls for Islam* dengan jalan damai (melalui pendidikan, persuasion and preaching menurut prinsip-prinsip dakwah). Jihad aktif hanya *an auxiliary means* untuk membantu dakwah; sedangkan Bin-Laden dan para pengikutnya memandang “jihad perang” sebagai satu-satunya visi dan tujuan utama (Schweitzer dan Shay 2003, 31-32).

Mana yang harus didahulukan, dakwah atau jihad dengan kekerasan, merupakan perdebatan teologis dan politis yang tak pernah usai dalam gerakan radikal dan Islamis (Islamist movement). Perdebatan ini terjadi pada Ikhwanul Muslimin dan juga Al-Qaidah (antara Maqdisi dan Zarqawi).

Walaupun kelompok Salafi sepakat tentang pentingnya Nabi dan Sahabat sebagai model, namun mereka berbeda

pendapat tentang cara yang tepat untuk menciptakan masyarakat yang Islami dan melindungi ummat Islam. Perbedaan mereka terletak pada penekanan pada salah satu dari empat metode dasar untuk mempromosikan Islam sebagai berikut:

1) *Dakwah*. Golongan Salafi yang fokus pada metode dakwah menekankan pentingnya kesalehan, hadis-hadis yang sahih, dan penyebaran ajaran Islam yang benar. Bagi kelompok ini, prioritas pada individu untuk mengamalkan ajaran Islam yang murni. Dalam hal ini mereka tidak hanya melakukan dakwah dan kesalehan individual, tetapi juga tidak menerima hadis yang daif dan palsu sehingga orang Islam dapat mengamalkan ajaran nabi yang benar.

2) *Nasehat*. Kelompok ini meyakini bahwa tanggung jawab ulama adalah menasehati para pemimpin tentang hukum Islam. Namun, secara umum mereka meyakini bahwa nasehat harus diberikan secara tertutup dan pribadi.

3) *Aksi non-kekerasan*. Golongan Salafi ini meyakini bahwa orang Islam (terutama ulama) harus secara terbuka menentang atau berbicara lantang menentang perbuatan yang tidak Islami, keputusan dan kebijakan publik yang tidak Islami. Metode yang digunakan berupa khutbah Jum'at, surat terbuka, pidato, demonstrasi dan pawai.

4) *Aksi kekerasan*. Golongan Salafi radikal ini berargumen bahwa adalah kewajiban dalam Islam untuk menurunkan pemimpin-pemimpin yang tidak secara benar mengikuti dan menerapkan Islam. Kelompok Salafi ini dikenal sebagai kelompok jihadi. Mereka tidak menolak metode-metode lainnya, namun mereka menekankan pentingnya kekerasan. Al-Qaeda adalah bagian dari kelompok ini (Wiktorowicz dan Kaltner 2003, 77-78).

Gerakan Islam radikal dalam orientasinya terhadap tatanan hukum

demokratis (*democratic legal order*) dibagi menjadi dua kategori: gerakan dakwah radikal (*radical dawa*) dan jihad kekerasan (*violent jihad*). Disebut gerakan "dakwah radikal", radikal karena berusaha merubah tatanan hukum demokratis menjadi Islami, dakwah karena dilakukan melalui aktivitas jangka panjang tanpa kekerasan. Sedangkan gerakan "jihad kekerasan" berusaha merubah tatanan hukum demokratis menjadi Islami dalam waktu singkat dengan cara kekerasan dan terorisme (The Dutch General Intelligence and Security Service 2004, 2007).

Berdasarkan orientasi dan strateginya terhadap tatanan hukum yang demokratis, gerakan dakwah radikal pada dimensi vertikal dari tatanan hukum yang demokratis berusaha membentuk pemerintahan yang sama sekali berbeda dari pemerintahan yang bertatanan hukum demokratis. Kelompok-kelompok Islam radikal yang termasuk dalam tipe ini berusaha mendirikan negara Islam, namun melalui saluran-saluran atau prosedur yang demokratis. Misalnya, mereka ingin menerapkan syariat jika menang pemilu.

Dakwah, Islam Politik, Islam Kultural dan Struktural

Dalam konteks filsafat politik, metode dakwah baik dengan atau tanpa kekerasan adalah terkait dengan legitimasi negara dalam memonopoli kekerasan dan isu kebebasan beragama. Kedua ide ini merupakan landasan pemikiran yang mengharuskan dakwah dilakukan secara damai atau tanpa kekerasan.

Ide tentang pentingnya hukum dan monopoli kekerasan oleh negara pada negara-bangsa dapat ditelusuri pada ide tentang hukum positif dan kekuasaan negara modern. Hukum positif sebagai bagian dari paket

modernitas dalam masyarakat demokratis berdasarkan pada prinsip-prinsip rasionalitas, liberasi dari otoritas politik dan keagamaan tradisional, dan hak semua manusia untuk memilih dan membentuk dirinya sendiri.

Secara umum ada tiga posisi tentang hubungan agama dan negara. Pertama, mereka yang memandang bahwa Islam adalah agama dan negara (*din wa daulah*) yang menghendaki adanya negara Islam dan pemerintahan Islam (*an-nizam al-islami*). Kedua, mereka yang menyatakan bahwa Islam adalah agama saja, bukan negara. Karena itu, antara urusan agama dan negara harus dipisahkan, negara tidak boleh mencampuri urusan agama.

Kemudian muncul kelompok ketiga yang memandang Islam sebagai hakikat, yaitu nilai-nilai dasar dan universal yang dimiliki Islam. Bagi mereka hubungan Islam dan negara berada pada wilayah nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua warga negara dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan ras. Islam dapat berperan dalam mendukung, memberi dan mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan, kesamaan, kebebasan dalam kehidupan bernegara. Islam juga dapat merumuskan perannya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pandangan kelompok pertama tidak atraktif dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*). Mengingat negara-bangsa terdiri dari berbagai warga yang mempunyai latar belakang yang beragam, baik suku, ras, dan terpenting latar pluralisme agama. Pandangan kedua sangat menarik bagi golongan non-Muslim dan sekularis, serta sebagian mereka yang beragama Islam. Pandangan ketiga merupakan jalan keluar yang aman bagi mereka yang beragama Islam namun tetap menginginkan peran Islam dalam

kehidupan bernegara. Aman, karena mereka bermain pada wilayah nilai-nilai universal yang dirumuskan dalam bahasa yang universal juga, sehingga formulasinya mempunyai peluang yang besar untuk dapat diterima oleh berbagai pihak dari kalangan non-Muslim.

Hubungan dakwah dan politik di Indonesia, sebelum maraknya fenomena terorisme, dapat dipahami melalui klasifikasi gerakan Islam di Indonesia menjadi "Islam Politik", "Islam Struktural" dan "Islam Kultural" (Abdillah 1999, 13-17). Intelektual Muslim seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid menekankan pentingnya Islam kultural. Sementara Deliar Noer menekankan pentingnya Islam politik dan perlunya partai politik Islam (Assyaukanie 2009, 186).

Orientasi, gerakan atau aktivitas Islam kultural melakukan sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam melalui upaya-upaya yang menekankan pada perubahan kesadaran dan tingkah laku umat/masyarakat tanpa keterlibatan negara dan tanpa perubahan sistem nasional menjadi sistem yang Islami. Sedangkan Islam struktural menekankan upaya-upaya ini melalui penetapan sistem nasional maupun kebijakan publik yang Islami. Upaya struktural ini tidak melalui dilakukan melalui partai politik Islam, meskipun tentu saja mengharuskan adanya *political will* dari para pengambil kebijakan publik (Abdillah 1999).

Gerakan atau aktivitas Islam kultural kadang juga dibedakan dengan Islam politik. Gerakan Islam kultural adalah aktivitas umat Islam untuk memperjuangkan aspirasinya melalui aktivitas-aktivitas yang bersifat non-politik, seperti melalui organisasi massa, aktivitas dakwah, lembaga-lembaga sosial, dan sebagainya selain partai politik. Sedangkan gerakan Islam

politik memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui partai politik Islam, yang bisa diidentifikasi melalui penggunaan nama, asas, tujuan ataupun simbol Islam (Abdillah 1999).

Apakah partai Islam sedang berdakwah dalam berbagai pemaknaannya? Atau sebaliknya mempolitisasi Islam untuk meraih kekuasaan? Menurut sebagian kalangan, partai politik, termasuk partai Islam, di Indonesia lebih banyak melakukan politisasi Islam daripada memperjuangkan Islam.

Penutup

Walaupun dakwah pada awalnya identik dengan upaya kultural, namun upaya pihak-pihak yang menarik dakwah ke dalam lingkaran jihad maupun politik telah merubah pemaknaan terhadap dakwah. Dalam Islam politik, dakwah identik dengan tujuan politik Islam itu sendiri, yaitu tegaknya syariat dan negara Islam. Tapi politik juga berbicara tentang pertanyaan (1) siapa mendapat apa? Mencakup (a) Atas dasar apa seseorang memiliki harta?; (b) Hak-hak dan kebebasan apa yang mereka miliki? Pertanyaan (2) siapa yang bertitah? Yaitu kekuasaan politik mencakup; (a) hak untuk memerintah; (b) hak untuk menghukum; (c) siapa yang memegang kekuasaan. Pertanyaan lainnya: Apakah ada batasan yg sah atas kebebasan saya? Bagaimana seharusnya hubungan antara kekuasaan politik dan kesuksesan ekonomi? Apakah memang ada hubungan antara kekayaan dan kekuasaan politik? Apakah harus kaya dulu, baru berkuasa secara politis? Atau apakah kekuasaan politik adalah jalan untuk menjadi kaya? Jika seseorang mempunyai kekuasaan politik yang sah/legitimate atas saya, maka mereka mempunyai hak untuk memaksa saya untuk melakukan

sesuatu dan banyak hal. Tapi, atas dasar apa orang lain menjustifikasi klaimnya bahwa ia memiliki hak seperti itu terhadap saya?

Referensi

- Abdillah, Masykuri. 1999. "Islam Politik dan Islam Struktural." Dalam *Mengapa partai Islam kalah? : perjalanan politik Islam dari prapemilu '99 sampai pemilihan presiden*, diedit oleh Hamid Basyaib and Hamid Abidin, 13-17. Jakarta: AlvaBet.
- Assyaukanie, Luthfi. 2009. *Islam and the secular state in Indonesia, ISEAS series on Islam*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Poston, Larry A. 1991. "Da'wa in the West." Dalam *The Muslims of America*, diedit oleh Yvonne Yazbeck Haddad, 125-135. New York: Oxford University Press.
- Racius, Egdunas. 2004. *The multiple nature of the Islamic Da'wa*. Helsinki: University of Helsinki.
- Schweitzer, Yoram, dan Shaul Shay. 2003. *The globalization of terror : the challenge of Al-Qaida and the response of the international community*. New Brunswick N.J.: Transaction Publishers.
- Shay, Shaul. 2008a. *Islamic Terror and the Balkans*. New Brunswick and London: Transaction Publishers.
- Shay, Shaul. 2008b. *Somalia between jihad and restoration*. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers.
- The Dutch General Intelligence and Security Service. 2004. *From Dawaa to Jihad: The various threats from radical Islam to the democratic legal order*. The Hague: The Dutch General Intelligence and Security Service.
- The Dutch General intelligence and Security Service. 2007. *The radical*

dawa in transition: The rise of Islamic neoradicalism in the Netherlands. The Hague: The Dutch General intelligence and Security Service Communications Department.

Wiktorowicz, Q., dan J. Kaltner. 2003. "Killing in the name of Islam: Al-Qaeda's justification for September 11." *Middle East Policy* vol. 10 (2):76-92.